



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG**

RENCANA STRATEGIS

2025-2029



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas petunjuk-NYA, kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun 2025 - 2029. Renstra ini diharapkan mampu menjadi pedoman dan acuan kerja selama 5 tahun ke depan.

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun 2025 - 2029 berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029, dan sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur dan program dan kegiatan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Penyusunan Rencana Strategis ini bertujuan untuk menyusun menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran.

Dengan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun 2025 - 2029, kami berharap dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang serta memberikan nilai manfaat dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Rembang.

Rembang, September 2025
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG



Ir. MOCH SOFYAN CHOLID

Pembina Utama Muda
NIP. 19660729 199303 1 004

DAFTAR ISI

	Hal
JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud Dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	10
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	10
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	61
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	68
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	68
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	69
3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	71
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	71
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	77
4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif Urusan	77
4.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	117
BAB V PENUTUP	120
5.1 Kaidah Pelaksanaan.....	120
5.2 Pengendalian dan Evaluasi.....	120
5.3 Pedoman Transisi	122

DAFTAR TABEL

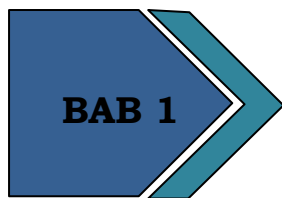
	Hal
Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.....	17
Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Berdasarkan Golongan	19
Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.....	21
Tabel 2.4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024	33
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024	44
Tabel 2.6 Pagu Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024	45
Tabel 2.7 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah	63
Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029	70
Tabel 3.2 Tahapan Rencana Strategis	75
Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan	76
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan	79
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendanaan	100
Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026-2030	109
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD (IKU)	118
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci PD (IKK)	119

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	16

DAFTAR GRAFIK

		Hal
Grafik 2.1	Target dan Realisasi Pendapatan Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 – 2024	58



PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Rembang memegang peranan yang sangat penting, hal ini berdasarkan kondisi bahwa sekitar 25.420 masyarakat menggantungkan sumber penghidupannya pada potensi sumberdaya laut dan pesisir, maka banyak kawasan pesisir yang berkembang bagi berbagai kegiatan ekonomi lain selain bidang kelautan dan perikanan di antaranya usaha pariwisata, perhubungan, industri, perdagangan dan sebagainya. Kawasan pesisir Kabupaten Rembang memiliki kekayaan sumberdaya alam yang besar karena didukung oleh adanya sumberdaya hayati dan non hayati yang bernilai tinggi, seperti terumbu karang, ekosistem mangrove/bakau, estuaria dan lain sebagainya. Sumberdaya alam tersebut telah memberikan kontribusi pendapatan bagi masyarakat di Kabupaten Rembang.

Pengelolaan potensi dan pemanfaatan peluang tersebut memerlukan perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang matang, melalui implementasi ekonomi biru untuk menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan dan ketahanan pangan nasional. Ekonomi biru mengacu pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan, termasuk di dalamnya kegiatan seperti perikanan, pariwisata bahari, transportasi laut, energi terbarukan, dan industri yang terkait dengan kelautan.

Namun demikian, peran ekonomi biru dalam memperkuat ketahanan ekonomi tidak terlepas dari tantangan dan risiko yang perlu diatasi, maka dari itu diperlukan perencanaan pengembangan sektor kelautan dan perikanan yang mampu mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional sebagai upayaantisipasi terhadap hambatan serta tantangan dalam pengelolaan. Secara teknis, perencanaan pengelolaan yang baik harus mampu mengantisipasi karakter sumberdaya perikanan laut yang pada hakekatnya tidak dapat dibatasi berdasarkan wilayah administrasi dan bersifat terbuka dalam pemanfaatannya. Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan ke

depan akan dikembangkan melalui berbagai industri kelautan dan perikanan yang berorientasi pasar dan berbasis pada kelestarian lingkungan.

Dengan demikian, pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Rembang diarahkan sebagai pendukung ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan, mengatasi penurunan produksi perikanan tangkap, peningkatan produksi perikanan budidaya, peningkatan produksi pengolahan perikanan, peningkatan angka konsumsi ikan. Dalam implementasi ekonomi biru sektor kelautan dan perikanan dalam menyokong pertumbuhan ekonomi, memberikan sumber daya pangan dan protein yang vital bagi populasi, serta menawarkan peluang ekonomi yang berkelanjutan untuk masyarakat pesisir dan pulau-pulau di seluruh dunia. Untuk itu diperlukan suatu model perencanaan yang mengintegrasikan berbagai perencanaan nasional dan regional dalam bentuk Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2025-2029.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada tingkatan Perangkat Daerah penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dinamakan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan langkah strategis untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif. Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah harus mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJPD dan RPJMD, RPJMD Provinsi, serta RPJM Nasional. Selain itu, Renstra Perangkat Daerah juga memperhatikan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dan Renstra K/L.

Dengan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat memberi arah dan strategi penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029. Renstra ini selanjutnya dapat dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja OPD sebagai pedoman dalam penyusunan RKA OPD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas Batas Wilayah Kota Praja dan Daerah Swatantra Tingkat II Rembang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008

- tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 18. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

21. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 170);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 170);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 207);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2022 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
36. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender;
37. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
38. Surat Edaran Bupati Rembang No 000.7/3199/2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Dokumen Rancangan Akhir Renstra PD tahun 2025-2029

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan pada bidang perikanan untuk kurun waktu lima tahun secara terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun 2025 -2029 antara lain :

- 1. Tersusunnya tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Rembang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode 2025-2029
- 2. Teridentifikasinya program/kegiatan dan indikator kinerja program/kegiatan tahunan bagi perencanaan operasional yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
- 3. Tersusunnya tolok ukur kinerja yang merupakan dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Dinas Perikanan Kabupaten Rembang selama periode 2025-2029
- 4. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi, dan sinergi baik antar fungsi OPD maupun antara Pusat dan Daerah.

1.4. **SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penyusunan Dokumen Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

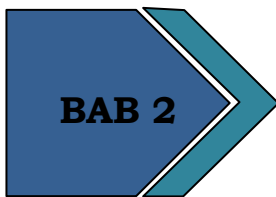
- 3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif Bidang Urusan
- 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

- 5.1. Kaidah Pelaksanaan
- 5.2. Pengendalian dan Evaluasi
- 5.3. Pedoman Transisi



GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN REMBANG

2.1 Gambaran Umum Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Kelautan dan Perikanan

1. Susunan Organisasi

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Berdasarkan peraturan tersebut, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Kenelayanan;
- d. Bidang Perikanan Budidaya;
- e. Bidang Bina Usaha dan Peningkatan Daya Saing;
- f. UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Uraian Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang

Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan;
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Di dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 21 tahun 2021 tersebut di atas, setiap pejabat struktural dalam lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang tersebut di atas memiliki tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya masing-masing, sebagaimana berikut :

A. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tugas Pokok :

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Administrasi Kelautan dan Perikanan;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Administrasi Kelautan dan Perikanan;

3. Pelaksanaan kebijakan di bidang Administrasi Kelautan dan Perikanan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Administrasi Kelautan dan Perikanan;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIS

Tugas Pokok :

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Fungsi :

- a. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- c. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- d. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;

- e. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya

KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

Tugas Pokok :

- a. Penyiapan bahan perumusan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
- b. Pengoordinasian bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
- c. Pelaksanaan dan pemantauan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
- d. Evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tugas Pokok :

- a. Penyiapan bahan perumusan pembinaan ketatausahaan, produk hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
- b. Pengoordinasian pembinaan ketatausahaan, produk hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan,

- kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
- c. Pelaksanaan dan pemantauan pembinaan ketatausahaan, produk hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
 - d. Evaluasi dan pelaporan pembinaan ketatausahaan, produk hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

C. KEPALA BIDANG KENELAYANAN

Tugas Pokok :

Melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Kenelayanan yang terdiri dari produksi dan sarana prasarana kenelayanan serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan produksi dan sarana prasarana kenelayanan serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
- b. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan produksi dan sarana prasarana kenelayanan serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan produksi dan sarana prasarana kenelayanan serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan;

- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai fungsinya.

D. KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

Tugas Pokok :

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang produksi budidaya serta sarana dan prasarana budidaya.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan produksi budidaya;
- b. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan sarana dan prasarana budidaya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan budidaya dan produksi garam serta sarana dan prasarana budidaya;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai fungsinya.

E. KEPALA BIDANG BINA USAHA DAN PENINGKATAN DAYA SAING

Tugas Pokok :

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang bina usaha dan peningkatan daya saing yang terdiri dari pengolahan dan peningkatan daya saing serta kemitraan dan pemasaran produk perikanan.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengolahan dan peningkatan daya saing serta kemitraan dan pemasaran produk perikanan;
- b. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pengolahan dan peningkatan daya saing serta kemitraan dan pemasaran produk perikanan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengolahan dan peningkatan daya saing serta kemitraan dan pemasaran produk perikanan;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai fungsinya.

Berikut bagan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan



Sumber : Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021

2.1.2 SUMBER DAYA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Sumber Daya Manusia Aparatur

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang didukung dengan sumber daya yang meliputi SDM (Sumber Daya Manusia) aparatur serta sarana dan prasarana.

Sumber daya manusia aparatur yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, baik yang berstatus PNS maupun PPPK, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel – tabel berikut ini. Sumberdaya manusia ini dibagi berdasarkan jabatan, golongan dan pendidikan terakhir yang ditempuh oleh masing-masing pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.

Tabel 2.1.

**Sumber Daya Manusia Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Rembang**

No	Tingkat Pendidikan	PNS		PPPK		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD Sederajat	0	0	16	3	19
2	SMP Sederajat	0	0	0	0	0
3	SMA Sederajat	7	1	73	20	101
4	D3	2	0	4	0	6
5	S1 / D4	13	7	19	14	53
6	S2	0	1	0	0	1
Jumlah		22	9	112	37	180

Sumber : Data Dinas Kelautan dan Perikanan, 2025

Tabel 2.2.

**Sumber Daya Manusia Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Rembang
Berdasarkan Golongan**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Golongan I	0	0	0
2	Golongan II	2	0	2
3	Golongan III	17	8	25
4	Golongan IV	3	1	4
5	Golongan IX	4	1	5

Sumber : Data Dinas Kelautan dan Perikanan, 2025

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah karyawan/karyawati Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang seluruhnya berjumlah 180 meliputi PNS sebanyak 31 dan PPPK sebanyak 149 dengan pendidikan terakhir pasca sarjana sebanyak 1 orang, sarjana sebanyak 53 orang atau 29,44%, D3 sebanyak 6 orang atau 3,33%, SMA sebanyak 101 orang atau 56,11% dan SD sebanyak 19 orang atau 10,56%. Dari data tersebut sebagian besar SDM Dinas Kelautan dan Perikanan didominasi lulusan Sekolah Menengah Atas sebanyak 101 orang atau 56,11%. Pasca Sarjana dan Sarjana di bidang kelautan dan perikanan sebanyak 27 orang, sarjana pertanian sebanyak 1 orang, sarjana ekonomi sebanyak 14 orang, , sarjana di bidang lain sebanyak 12 orang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebutuhan SDM Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dalam kategori mencukupi.

Ditinjau dari gender, ASN Dinas Kelautan dan Perikanan didominasi oleh laki-laki dengan jumlah 134 orang, dan sisanya perempuan sebanyak 46 orang. Komposisi SDM yang didominasi laki-laki ini erat kaitannya dengan beban pekerjaan di lapangan antara lain tempat pelelangan ikan, Balai Benih Ikan dengan pekerjaan teknis BBI dan tenaga operasional pengelolaan TPI.

2. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran sesuai target kinerja pelayanan yang ditetapkan, Dinas Kelautan dan Perikanan didukung dengan sarana dan prasarana aset pemerintah daerah. Kondisi aset yang dimiliki sebagian ada yang dalam kondisi rusak dan rusak berat. Sebagian aset ada yang tidak digunakan karena memerlukan biaya operasional yang besar. Sarana dan Prasarana yang dimiliki dinas kelautan dan perikanan sebagai pendukung kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3.
Sarana dan Prasarana
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	2		2
2	Tanah Bangunan Gedung Pelelangan Ikan	M2	6		6
3	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst)	M2	6		6
4	Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	M2	2		2
5	excavator lainnya (dst)		1		1
6	Portable Generating Set		3	1	4
7	Portable Water Pump		12		12
8	Stationary Water Pump		1		1
9	Pompa Air		1		1
10	pompa lainnya (dst)		1		1
11	Station Wagon		2		2
12	Mini Bus		1		1
13	Pick Up		2		2
14	Sepeda Motor		63	1	64
15	Gerobak Dorong		1		1
16	kendaraan tak bermotor angkutan barang lainnya (dst)		1		1
17	Speed Boat / Motor Tempel			1	1
18	PH Meter (Alat Ukur Universal)		31		31
19	Global Positioning System		1		1
20	Ukuran Tinggi Orang		1		1
21	alat ukur lain-lain lainnya (dst)		5		5
22	Timbangan Meja Kapasitas 10 Kg		4		4

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
23	anak timbangan/biara lainnya (dst)		4		4
24	alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak lainnya (dst)		4		4
25	Alat Produksi Perikanan lainnya		2		2
26	Alat Pengolahan lainnya		3		3
27	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)		8		8
28	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)		2		2
29	Mesin Ketik Listrik		3		3
30	Mesin Hitung Elektronik/Calculator		3		3
31	Mesin Penghitung Uang		1		1
32	Lemari Besi/Metal		7		7
33	Lemari Kayu		36		36
34	Rak Besi		3		3
35	Filing Cabinet Besi		26		26
36	Filing Cabinet Kayu		20		20
37	Lemari Kaca		1		1
38	CCTV - Camera Control Television System		2		2
39	Papan Visual/Papan Nama		4		4
40	White Board		7		7
41	Mesin Absensi		4		4
42	Papan Nama Instansi		7		7
43	Alat Kantor Lainnya		2		2
44	Meja Kerja Kayu		40		40
45	Kursi Besi/Metal		35		35
46	Kursi Kayu		46		46
47	Meja Rapat		5		5
48	Meja Telepon		1		1
49	Meja Resepsionis		2		2
50	Meja Periksa Pasien		1		1
51	Meja 1/2 Biro		15		15
52	Kursi Fiber Glas/Plastik		50		50
53	Kursi Rapat		91		91
54	Kursi Tamu		1		1
55	Kursi Putar		16		16
56	Kursi Biasa		67		67
57	Bangku Tunggu		10		10
58	Meja Komputer		2		2
59	Sofa		1		1
60	Meubeler lainnya		20		20

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
61	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner		2		2
62	Mesin Pemotong Rumput		3		3
63	Lemari Es		1		1
64	A.C. Window		8		8
65	A.C. Split		30		30
66	Kipas Angin		27		27
67	Alat Pendingin lainnya		2		2
68	Kompor Gas (Alat Dapur)		2		2
69	Alat Dapur lainnya		1		1
70	Televisi		9		9
71	Amplifier		5		5
72	Loudspeaker		7		7
73	Sound System		3		3
74	Wireless		2		2
75	Megaphone		4		4
76	Microphone		34		34
77	Camera Video		11		11
78	Timbangan Barang		1		1
79	Alat Hiasan		1		1
80	Lambang Garuda Pancasila		3		3
81	Dispenser		4		4
82	Handy Cam		5		5
83	Alat Rumah Tangga Lain-lain		12		12
84	Meja Kerja Pejabat Eselon II		2		2
85	Meja Kerja Pejabat Eselon III		1		1
86	Meja Kerja Pejabat lain-lain		50		50
87	Meja Rapat Pejabat Eselon II		1		1
88	Meja Tamu Biasa		3		3
89	Meja Rapat Pejabat lainnya		1		1
90	Kursi Kerja Pejabat lainnya		48		48
91	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III			1	1
92	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II		1		1
93	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis		1		1
94	Audio Amplifier		5		5
95	Audio Amplifier		4		4
96	Power Amplifier		1		1
97	Camera Electronic		6		6

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
98	Lensa Kamera		1		1
99	Layar Film/Projector		7		7
100	Head Set		1		1
101	Camera Conference		2		2
102	Alat Studio Lainnya		6		6
103	Telephone Mobile		4		4
104	Facsimile		2		2
105	Translator VHF/UHF Portable		4		4
106	Tensimeter		1		1
107	Bubble Nitrogen Detector		1		1
108	Alat Pengukur Kadar Air		1		1
109	Blender		2		2
110	Refractometer (Alat Laboratorium Umum)		6		6
111	alat laboratorium makanan lainnya (dst)		3		3
112	Alat Selam		1		1
113	DO Meter (Alat Laboratorium Kualitas Air Dan Tanah)		2		2
114	alat laboratorium kualitas air dan tanah lainnya (dst)		1		1
115	P.C Unit		3		3
116	Lap Top		33		33
117	Note Book		8		8
118	Personal Komputer lainnya		19		19
119	Komputer Unit Lainnya		2		2
120	Hard Disk		4		4
121	Scanner (Peralatan Mini Komputer)		2		2
122	Peralatan Minikomputer lainnya		9		9
123	Printer (Peralatan Personal Komputer)		41		41
124	Peralatan Jaringan lainnya		6		6
125	Peralatan Proses lainnya		1		1
126	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya		1		1
127	Peralatan Olahraga lainnya (dst)		1		1
128	Bangunan Gedung Kantor Permanen	M2	17	1	18
129	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	M2	1		1
130	Bangunan Gedung Kantor Darurat	M2		1	1
131	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	M2	7		7
132	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	M2	2		2
133	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	M2	2		2
134	Bangunan Gudang Untuk Bengkel Lain-lain	M2	1		1

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
135	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	M2	1		1
136	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	M2	3		3
137	Gedung Pos Jaga Permanen	M2	3		3
138	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain (dst)	M2	1		1
139	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	M2	2		2
140	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Semi Permanen	M2	2		2
141	Bangunan TPI Permanen	M2	2		2
142	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	M2	11		11
143	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Darurat	M2	1		1
144	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	M2	13	5	18
145	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi)	M2	1		1
146	Bangunan air irigasi lainnya	M2	1		1
147	Kolam Pasang	M2	2	1	3
148	Krib Pengaman Sungai/Pantai	M2	1		1
149	Bangunan Dermaga	M2	4		4
150	Bak Penampung/Kolam/ Menara Penampungan	M2	3		3
151	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum	M2	1		1
152	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	M2	1	3	4
153	Jaringan Transmisi Lain-lain	M2		1	1
154	Jaringan Distribusi Lain-lain	M2	1		1
155	Buku Umum Lain-lain		2		2
156	Peta (Map)		1	1	2
157	Karya Seni Lain-lain		1		1
158	Maket/Miniatur/Replika		1		1
159	Barang Kerajinan Lain-lain		1		1
160	Ikan Air Tawar Budidaya		2132	1	2.133
161	Ikan Air Payau Budidaya		7		7
JUMLAH					3.422

Sumber : Data Dinas Kelautan dan Perikanan, 2025

Pada tabel II.1 di atas dapat dilihat jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang (sampai dengan tahun 2025).

Sarana kerja penunjang lain yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang adalah berupa sarana informasi portal berupa website dengan alamat akses <http://dinlutkan.rembangkab.go.id>; lalu email: dinlutkan@rembangkab.go.id, facebook: [dinlutkan_rembang](#); Twitter [@dinlutkan_rbg](#); Instagram [@dinlutkan_rembang](#); Sarana informasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan layanan informasi pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Rembang.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang merupakan instansi Pemerintah Kabupaten Rembang yang mempunyai wewenang untuk mengelola potensi kelautan dan perikanan yang terdapat di Kabupaten Rembang. Pengelolaan potensi kelautan dan perikanan tersebut dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dengan dana yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Tengah, maupun dari APBN baik melalui DAK (Dana Alokasi Khusus), TP (Tugas Pembantuan) maupun Dekonsentrasi. Sumberdaya kelautan dan perikanan telah banyak memberikan manfaat dan kontribusi dalam pengembangan ekonomi masyarakat di Kabupaten Rembang. Namun demikian, manfaat pembangunan kelautan dan perikanan yang dinikmati saat ini belum secara optimal dirasakan oleh semua masyarakat Kabupaten Rembang, sehingga pembangunan kelautan dan perikanan perlu dipacu di berbagai daerah potensial untuk menjamin pencapaian manfaat yang optimal. Pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Rembang merupakan salah

satu faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Rembang guna mewujudkan masyarakat Rembang yang mandiri dan sejahtera. Hal ini dikarenakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan memiliki aspek penting yang saling berinteraksi erat antara sistem ekonomi (*Economic System*), masyarakat (*Social System*) dan lingkungan hidup (*Ecosystem*).

Kabupaten Rembang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Hal ini ditandai dengan wilayah pantai Kabupaten Rembang sepanjang 63,5 km yang banyak terkandung berbagai potensi kekayaan hasil laut yang melimpah seperti sumberdaya jenis ikan dengan hasil tangkapan yang dominan dan bernilai ekonomis tinggi antara lain ikan Layang, Tembang, Tongkol, Bawal, Tengiri, Teri, Kakap, Cumi-cumi, Kurisi, Layur, Manyung dan Rajungan. Jenis-jenis ikan tersebut ditangkap dengan menggunakan jenis alat tangkap dan kapal yang berlainan sesuai dengan kesesuaian alat tangkap. Di samping itu Kabupaten Rembang juga mempunyai kawasan pesisir seluas 355,95 km² atau 35% dari luas wilayah Kabupaten Rembang. Di samping itu juga ada jenis – jenis ikan ekonomis tinggi yang dibudidayakan, di antaranya Lele, Nila, Udang Vanamei, Bandeng. Selain adanya pembesaran ada juga pembenihan skala rumah tangga atau Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT).

Tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang pada Renstra 2021-2025 yaitu “Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan”, dengan indikator kinerja adalah laju Pertumbuhan PDRB PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Target kinerja pada tahun 2022 sebesar 1,9 terealisasi 1,67 capaian kinerja 87,89 %, target tahun 2023 sebesar 2,1 dengan realisasi 2,14 capaian kinerja sebesar 101,90%, target tahun 2024 sebesar 2,5 terealisasi 0,002 dengan capaian kinerja 0,87%.

Untuk mendukung pencapaian target kinerja pada tujuan Renstra 2021-2025, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang menetapkan sasaran strategis “Peningkatan Produksi Perikanan” dengan indikator Presentase Pertumbuhan Produksi Perikanan.

Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki target peningkatan sebesar 1% setiap tahunnya. Peningkatan produksi perikanan tahun 2021 sebesar -2,72% dan mendapatkan capaian kinerja -272%. Target peningkatan produksi perikanan tahun 2022 sebesar 1%, dengan realisasi sebesar -4,97% dan mendapatkan capaian kinerja -497%. Target peningkatan produksi perikanan tahun 2023 sebesar 1%, dengan realisasi sebesar -3,49% dan mendapatkan capaian kinerja -349%. Target peningkatan produksi perikanan tahun 2024 sebesar 1% terealisasi sebesar -9,28% dengan capaian kinerja -928% dan Target peningkatan produksi perikanan tahun 2025 sebesar 1%.

Pertumbuhan produksi perikanan 2021-2024 menghasilkan rata-rata sebesar -5,11%. Berbagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan produksi perikanan telah dilakukan melalui beberapa program yang mendukung sebagai berikut:

A. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Target indikator kinerja pada Program Pengelolaan Perikanan Tangkap meliputi persentase pertumbuhan produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan tangkap.

Indikator persentase pertumbuhan produksi perikanan tangkap pada tahun 2021 memiliki target 0,5% dan terealisasi -12,33% dengan capaian kinerja -1.233%, pada tahun 2022 memiliki target 0,5% dan terealisasi -9,62% dengan capaian kinerja -962%; pada tahun 2023 memiliki target 0,5% dan terealisasi -

10,29% dengan capaian kinerja -1.029%; pada tahun 2024 memiliki target 0,5% dan terealisasi -3,91% dengan capaian kinerja -391%. Pertumbuhan produksi perikanan tangkap 2021-2024 menghasilkan rata-rata sebesar -9,38%, berbagai terobosan guna pencapaian target kinerja telah dilakukan antara lain melalui kegiatan pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap, sosialisasi dan peningkatan kapasitas nelayan serta pemberian bantuan hibah sarana dan prasana penangkapan ikan kepada nelayan.

Adapun tidak tercapainya target produksi perikanan tangkap disebabkan oleh penurunan sumber daya ikan di daerah laut Jawa dikarenakan *over exploitation*, serta menurunnya aktivitas penangkapan ikan akibat dari kenaikan BBM pada tahun 2022 dan juga kondisi cuaca yang buruk yaitu musim gelombang yang terjadi cukup lama (musim barat) disertai dengan angin kencang yang menyebabkan nelayan tidak berani melaut karena berisiko tinggi.

Pada Tahun 2024 memiliki target 0,5% dan terealisasi -3,91% dengan capaian kinerja -391%. Penurunan produksi perikanan pada tahun 2024 diakibatkan oleh beberapa hal antara lain:

- a. Menurunnya produksi perikanan tangkap disebabkan oleh berkurangnya aktivitas penangkapan ikan di laut karena adanya kondisi cuaca yang buruk yaitu musim gelombang yang terjadi cukup lama (musim barat) disertai dengan angin kencang hal ini menjadikan nelayan tidak berani melaut karena berisiko tinggi. Adanya dampak turunnya daya beli masyarakat terhadap produk perikanan karena adanya pembatasan kuota BBM bersubsidi sehingga nelayan mengurangi intensitas melaut.

- b. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur memaksa pemilik kapal untuk melaksanakan penangkapan sesuai dengan jalur dan sesuai dengan kuota yang telah diberikan sehingga menyebabkan penurunan jumlah tangkapan dibandingkan sebelum adanya peraturan tersebut.
- c. Terbitnya peraturan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan yang berasal Dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan yang menyebutkan adanya pemungutan penerimaan negara bukan pajak yang dipungut pasca produksi membuat banyak pelaku usaha perikanan menghentikan sementara kegiatan produksinya karena menganggap pemungutan PNBP tersebut membebani mereka karena besarnya nilai presentase pungutan.
- d. Terbitnya Peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 140 tahun 2023 tentang harga acuan ikan yang secara umum terlalu tinggi dibandingkan dengan kondisi harga asli di lapangan menyebabkan besarnya pungutan PNBP Pasca Produksi perikanan, karena pungutan PNBP Pasca Produksi tersebut didasarkan atas hasil tangkapan dan menggunakan acuan harga patokan yang ditetapkan oleh kementerian kelautan dan perikanan.
- e. Pengaruh adanya krisis global menyebabkan penurunan permintaan ekspor hasil pengolahan perikanan dan ikan segar sehingga menyebabkan penurunan permintaan bahan baku industri pengolahan perikanan serta penurunan ekspor ikan segar ke luar negeri. Penurunan permintaan ekspor tersebut menyebabkan harga ikan di pasaran menurun secara drastis,

tidak terserapnya hasil tangkapan tersebut bersamaan dengan bertiupnya angin muson timur (musim timuran) dimana kondisi perairan stabil dan melimpahnya hasil tangkapan semakin menurunkan nilai jual hasil tangkapan. Tidak terserapnya hasil tangkapan nelayan berlangsung sejak akhir tahun 2023 sampai dengan pertengahan tahun 2024

- f. Kondisi overfishing dan degradasi lingkungan di perairan laut Jawa menyebabkan produksi perikanan tangkap secara umum menurun.
- g. Relatif tingginya unreported produksi hasil tangkapan/hasil tangkapan yang tidak dilaporkan atau tercatat.
- h. Masih belum optimalnya pengamanan daerah asuhan ikan (jalur 1a atau 0-2 mil) dari alat tangkap aktif bermesin.

Permasalahan yang dihadapi adalah penerapan peraturan Penangkapan Ikan Terukur memberikan dampak positif dan negatif. Positifnya membuat produksi perikanan tangkap meningkat, disisi lain setelah diwajibkan bongkar muat di pelabuhan pangkalan maka produksi perikanan tangkap di Jawa Tengah akan menurun karena sebagian besar berasal dari wilayah Timur Indonesia atau Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 718; terjadinya penurunan SDI di laut Jawa; terjadinya pendangkalan alur dan muara sungai serta kolam pelabuhan yang menghambat keluar-masuk kapal perikanan; infrastruktur dan sarpras pelabuhan yang terganggu air rob maupun yang rusak dan perlu diperbaiki. Upaya mengatasi antara lain mengusulkan kegiatan melalui DAK dengan menu sarpras nelayan kecil, pemberian hibah alat tangkap yang ramah lingkungan. Manfaat dari program tersebut adalah terjagannya SDI di Laut Jawa, meningkatnya pelayanan pelabuhan perikanan, meningkatnya retribusi dari sektor penangkapan ikan, terpenuhinya kebutuhan melaut para

nelayan, terjaminnya keselamatan kerja nelayan kecil, dan terpenuhinya persyaratan perizinan nelayan.

B. Program Pengelolaan Budidaya Perikanan

Target indikator kinerja pada Program Pengelolaan Perikanan Budidaya persentase pertumbuhan produksi perikanan budidaya. Indikator persentase peningkatan produksi benih pada tahun 2021 memiliki target sebesar 1,25% terealisasi 2,01% dengan capaian kinerja 160,8%. Pada tahun 2022 memiliki target sebesar 1,25%, terealisasi -1,97% mendapatkan capaian kinerja -157,82%. Pada tahun 2023 memiliki target sebesar 1,25% terealisasi -0,73% dengan capaian kinerja -58,4%. Pada tahun 2024 memiliki target sebesar 1,25% dengan realisasi 0,40% dan mendapatkan capaian kinerja 32% serta target pada tahun 2025 sebesar 1,25%.

Untuk mendukung pencapaian kinerja telah dilakukan berbagai antara lain melalui penggunaan induk dan benih unggul dalam proses produksi budidaya, pengendalian hama penyakit ikan, pelaksanaan sertifikasi penerapan Cara Budidaya Ikan yang baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) serta berkembangnya teknologi perikanan budidaya antara lain teknologi Bioflock.

Peningkatan produksi perikanan budidaya tahun 2024 terealisasi 0,40% dari target 1,25% sehingga persentase realisasi sebesar 32%. Realisasi produksi perikanan budidaya tidak tercapai dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Musim kemarau di Triwulan III dan awal Triwulan IV yang menyebabkan berkurangnya ketersediaan air untuk kegiatan budidaya.
2. Harga jual ikan di tingkat pembudidaya yang cenderung menurun (komoditas lele) karena masuknya produk perikanan

dari luar provinsi dengan harga yang lebih murah, daya beli masyarakat yang cenderung menurun, sehingga mengakibatkan pembudidaya membatasi jumlah tebar ikan untuk menghemat operasional.

3. Adanya wabah ADHD pada awal tahun 2024 sampai semester 1 berakhir.
4. Rendahnya minat masyarakat terhadap usaha budidaya perikanan di Kabupaten Rembang

C. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Target indikator kinerja pada Program Pengelolaan Perikanan Budidaya persentase pertumbuhan produksi perikanan budidaya. Indikator persentase peningkatan produksi benih pada tahun 2021 memiliki target sebesar 1,25% terealisasi 2,15% dengan capaian kinerja 172%. Pada tahun 2022 memiliki target sebesar 1,5%, terealisasi -3,31% mendapatkan capaian kinerja -264,8%. Pada tahun 2023 memiliki target sebesar 1,5% terealisasi 0,55% dengan capaian kinerja 44%. Pada tahun 2024 memiliki target sebesar 1,5% dengan realisasi 24,34% dan mendapatkan capaian kinerja 1.947,2% serta target pada tahun 2025 sebesar 1,25%.

Pada Tahun 2024 penurunan drastis pada data produksi pengolahan dan pemasaran produk pengolahan dikarenakan krisis global secara umum menyebabkan banyak perusahaan pengolahan hasil perikanan gulung tikar. Ada beberapa perusahaan pengolahan di Kabupaten Rembang sudah tidak mampu lagi memproduksi pasca pandemi COVID 19. Tutupnya perusahaan pengolahan di kabupaten rembang berdampak besar terhadap penurunan produksi pengolahan hasil perikanan. Menurunnya permintaan pasar internasional juga menyebabkan penurunan harga ikan hasil tangkapan karena banyak perusahaan tidak mampu memasarkan

hasil produksinya sehingga hasil tangkapan hanya menumpuk di cold storage. Sert adanya regulasi perubahan data sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten hanya mengelola data pengolahan ikan skala mikro dan kecil.

Selain berdasarkan Sasaran Strategis, kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan juga mengacu pada indikator kinerja tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Kelautan dan Perikanan.

Formulasi pengukuran kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan perbandingan antara realisasi terhadap target kuantitatif sasaran strategis, yaitu terhadap Indikator Kinerja pencapaian sasaran strategis tersebut. *Review* Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan Dan Perikanan dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2024

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Renstra PD				Rasio Capaian Renstra PD			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1				2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3.25				BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERTUMBUHAN PRODUKSI PERIKANAN	%	1	1	1	1	0,09	-2,72	-4,97	-3,49	-9,3			
3.25	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/KOTA	Nilai Sakip OPD	skor	Na	75	76	76	9,99	70	70,86	72,66				
					IKM	skor	Na	71	72	76	72,50	73,80	74,00	75,50				
3.25	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	Na	80	85	90	80	80	85	90				
3.25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Na	2	2	2		2	2	2				
3.25	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Na	1	1	1		1	1	1				
3.25	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Na	4	4	4		4	4	4				
3.25	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	%	Na	80	85	90		80	85	90				
3.25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Na	36	37	40		36	37	40				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Renstra PD				Rasio Capaian Renstra PD			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1				2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17
3.25	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Na	12	12	12		12	12	12				
3.25	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Na	2	2	2		2	2	2				
3.25	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	Na	16	16	16		16	16	16				
3.25	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	% Dokumen Penatausahaan BMD Dengan Kualitas Baik	%	Na	80	85	90		80	85	90				
					% Pemenuhan Penyediaan Pengadaan Barang Perangkat Daerah	%	Na	80	85	90		80	85	90				
3.25	1	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	Na	2	2	2		2	2	2				
3.25	1	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Na	2	2	2		2	2	2				
3.25	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	%	Na	75	80	85		75	80	85				
3.25	1	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	Na	4	2	4		4	2	4				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Renstra PD				Rasio Capaian Renstra PD			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1				2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17
3.25	1	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Na	40	37	34		40	37	34				
			0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	Na		2				2					
3.25	1	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Na	40	100	100		40	100	100				
			0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Na	40	100	100		40	100	100				
3.25	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	% pemenuhan pelayanan umum	%	Na	100	100	100		100	100	100				
3.25	1	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Na	12	12	12		12	12	12				
3.25	1	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Na	12	12	12		12	12	12				
3.25	1	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Na	12	12	12		12	12	12				
3.25	1	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Na	12	12	12		12	12	12				
3.25	1	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Na	12	12	12		12	12	12				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Renstra PD				Rasio Capaian Renstra PD			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1				2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17
3.25	1	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Na	12	12	12		12	12	12				
3.25	1	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	Na	12	12	12		12	12	12				
3.25	1	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Na	12	12	12		12	12	12				
3.25	1	2.06	0011	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Na	5	5	5		5	5	5				
3.25	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	%	Na	80	80			80	80					
3.25	1	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Na	0	1			0	0					
3.25	1	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	Na	2	0			2	0					
3.25	1	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Na	2	2	5		2	2	5				
3.25	1	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Na	1	0	0		1	0	0				
3.25	1	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Na	1	1			1	1					
3.25	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Pelayanan Penunjang Perkantoran	%	Na	100	100	100		100	100	100				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Renstra PD				Rasio Capaian Renstra PD			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1				2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17
3.25	1	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Na	12	12	12		12	12	12				
3.25	1	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Na	12	12	12		12	12	12				
3.25	1	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Na	12	12	12		12	12	12				
3.25	1	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Na	12	12	12		12	12	12				
3.25	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% BMD dengan kondisi Baik	%	Na	80	85	90		80	85	90				
3.25	1	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Na	77	78	76		76	76	76				
3.25	1	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Na	30	30	40		30	30	40				
3.25	1	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Na	20	20	15		20	20	15				
3.25	1	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Na	4	4	4		4	4	4				
3.25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pertumbuhan Produksi perikanan tangkap	%	Na	0,5	0,5	0,5	-12,33	-9,62	-10,29	-3,91				
3.25	03	201		<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	% Sarana dan prasarana perikanan tangkap dalam kondisi baik	%	Na	25	25	25								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Renstra PD				Rasio Capaian Renstra PD			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1				2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17
3.25	03	201	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	Na	3	3	3								
3.25	03	201	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit	Na	5	10	5								
3.25	03	201	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit	Na	15	10	25								
3.25	03	202		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pertumbuhan Kelas Kelompok Nelayan	%	Na	3	3	3								
3.25	03	202	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	Na	120	35	120								
3.25	03	202	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	Na	15	20	21								
3.25	03	202	0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Unit Usaha	Na	20	40	20								
3.25	03	203		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Kenaikan Nilai raman	%	Na	0,5	0,5	0,5								
3.25	03	203	0001	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dokumen	Na	2	2	2								
3.25	03	203	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	Na	3	3	3								
3.25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pertumbuhan produksi perikanan budidaya	%	Na	1,3	1,3	1,3	2,01	-1,97	-0,73	0,40				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Renstra PD				Rasio Capaian Renstra PD			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1				2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17
3.25	04	201		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi ijin usaha perikanan budidaya sesuai SOP	Rekomendasi	Na	20	7	7								
3.25	04	201	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Rekomendasi	Na	2	2	2								
3.25	04	201	0002	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	Rekomendasi	Na	5	5	5								
3.25	04	202		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	% Kenaikan Kelas Pokdakan, Kugar	%	Na	1,3	1,3	1,3								
3.25	04	202	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	Na	5	5	10								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Renstra PD				Rasio Capaian Renstra PD			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1				2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17
3.25	04	202	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Kelompok	Na	10	5	15								
3.25	04	202	0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahnya	Kelompok	Na	10	5	15								
3.25	04	202	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	Na	10	5	15								
3.25	04	204		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	% prasarana pembudidayaan ikan dan garam dalam kondisi baik	%	Na	20	25	35								
3.25	04	204	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Na	3	3	3								
3.25	04	204	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	Na	10	5	5								
3.25	04	204	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	Na	10	6	10								
3.25	04	204	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Dokumen	Na	10	6	5								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Renstra PD				Rasio Capaian Renstra PD			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1				2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17
3.25	04	204	0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang	Na	10	55	50								
3.25	05	204	0006	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Ha	Na	2	5	5								
3.25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	% Usaha perikanan budidaya yang taat peraturan	%	Na	25	35	45	NA	NA	NA	NA				
3.25	05	201		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	% Cakupan Pengawasan terhadap Usaha perikanan budidaya	%	Na	25	30	35								
3.25	05	201	0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	Na	20	25	30								
3.25	05	201	0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	Na	20	25	30								
3.25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Pertumbuhan Produksi Hasil Olahan Perikanan	%	Na	1,3	1,3	1,3	2,15	-3,31	0,55	-24,34				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Renstra PD				Rasio Capaian Renstra PD			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1				2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17
3.25	06	201		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	% Cakupan Data Pengolahan Perikanan	%	Na	65	65	60								
3.25	06	201	0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Data	Na	2	2	3								
3.25	06	202		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah produk pengolahan perikanan yang bersertifikat	Unit	Na	15	18	20								
3.25	06	202	0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	Na	25	18	20								
3.25	06	202	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	Na	30	35	40								
3.25	06	203		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Angka konsumsi ikan (Kg/Kapita/Tahun	Kg/Kapita/Tahun	Na	40.92	43.7	45.67								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra PD				Realisasi Renstra PD				Rasio Capaian Renstra PD			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1				2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17
3.25	06	203	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	Na	40.92	43.7	45.67								
3.25	06	203	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	Na	15	30	20								

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Tujuan/ Indikator Kinerja Sasaran/ Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target Renstra PD					Realisasi Renstra PD					Rasio Capaian Renstra PD				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Indikator Tujuan :																	
1	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Angka		NA	1,9	2,1	2,3		NA	1,67	2,14	0,02		NA	87,89	101,90	0,87
B. Indikator Sasaran :																	
	Presentase Pertumbuhan Produksi Perikanan	%		1	1	1	1		-2,72	-4,97	-3,49	-9,28		272,00	497,00	-349,00	-928,00
C. Indikator Kinerja Kunci :																	
	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) (sumber data: one data KKP)	ton	117.833,822	118.950,964	105.229,327	96.098,10	86.847,32	118.309,997	104.655,638	95.570,704	86.366,30	83.273,64	100,404	87,952	90,821	89,87306	95,8851

Tabel 2.6
 Pagu Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun 2020-2024

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program	Pagu Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Pagu Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	689.145.502	21.554.021.000	19.929.121.000	15.286.252.372	11.865.406.130	646.738.062	1.924.523.000	18.556.326.449	13.764.499.474	11.326.057.971	94	9	93	90	95
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	689.145.502	21.554.021.000	19.929.121.000	15.286.252.372	11.865.406.130	646.738.062	1.924.523.000	18.556.326.449	13.764.499.474	11.326.057.971	94	9	93	90	95
Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	689.145.502					646.738.062					94				
Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum	597.016.810					566.559.601					95				
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	64.718.750					57.131.811					88				
Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	5.199.952					3.588.000					69				
Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan	22.209.990					19.458.650					88				
Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.250.000					48.247.800					87				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.450.000					28.048.200					92				
Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	24.800.000					20.199.600					81				
Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	10.000.000					2.702.400					27				

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program	Pagu Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Pagu Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengelolaan keterbukaan informasi public	10.000.000					2.702.400					27				
Program Bina Usaha dan Peningkatan Daya Saing Perikanan	141.900.000					126.912.000					89				
Pengolahan dan Peningkatan Daya Saing Perikanan	30.000.000					22.167.000					74				
Kemitraan dan Pemasaran Produksi Perikanan	111.900.000					104.745.000					94				
Pengembangan Pelaku Usaha Industri Rumahang Perikanan.	-					-					-				
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	10.249.115.666					10.214.027.647					100				
Produksi dan Sarana Prasarana Kenelayanan	5.270.800.000					5.269.032.550					100				
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	60.556.766					52.258.400					86				
Pengelolaan TPI Terpadu	4.917.758.900					4.892.736.697					99				
Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Garam	966.349.250					936.490.830					97				
Produksi Budidaya Perikanan dan Garam	473.131.250					460.912.500					97				
Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan dan Garam	96.800.000					87.266.000					90				

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program	Pagu Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Pagu Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil	396.418.000					388.312.330					98				
Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	689.145.502					646.738.062					94				
Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum	597.016.810					566.559.601					95				
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	64.718.750					57.131.811					88				
Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	5.199.952					3.588.000					69				
Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan	22.209.990					19.458.650					88				
Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.250.000					48.247.800					87				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.450.000					28.048.200					92				
Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	24.800.000					20.199.600					81				
Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	10.000.000					2.702.400					27				
Pengelolaan keterbukaan informasi publik	10.000.000					2.702.400					27				
Program Bina Usaha dan Peningkatan Daya Saing Perikanan	141.900.000					126.912.000					89				

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program	Pagu Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Pagu Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengolahan dan Peningkatan Daya Saing Perikanan	30.000.000					22.167.000					74				
Kemitraan dan Pemasaran Produksi Perikanan	111.900.000					104.745.000					94				
Pengembangan Pelaku Usaha Industri Rumahang Perikanan.	-					-					-				
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	10.249.115.666					10.214.027.647					100				
Produksi dan Sarana Prasarana Kenelayanan	5.270.800.000					5.269.032.550					100				
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	60.556.766					52.258.400					86				
Pengelolaan TPI Terpadu	4.917.758.900					4.892.736.697					99				
Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Garam	966.349.250					936.490.830					97				
Produksi Budidaya Perikanan dan Garam	473.131.250					460.912.500					97				
Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan dan Garam	96.800.000					87.266.000					90				
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil	396.418.000					388.312.330					98				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/KOTA		8.696.168.000	9.009.521.000	7.805.822.272	7.920.697.830		1.924.523.000	8.636.290.235	7.519.703.987	7.760.615.785	-	22	96	96	98

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program	Pagu Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Pagu Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		23.528.900	20.000.000	11.480.000	5.680.000		18.915.000	19.681.000	11.380.000	1.650.000	-	80	98	99	29
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		18.528.900	15.000.000	11.480.000	5.680.000		16.848.000	14.731.000	11.380.000	1.650.000	-	91	98	99	29
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											-	-	-	-	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5.000.000	5.000.000				2.067.000	4.950.000			-	41	99	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.185.354.100	3.628.971.000	3.503.288.372	3.764.828.830		1.905.608.000	3.550.442.217	3.339.091.405	3.672.853.254	-	46	98	95	98
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3.918.883.000	3.354.171.000	3.344.408.372	3.639.878.830		1.905.608.000	3.296.672.217	3.259.651.405	3.551.753.254	-	49	98	97	98
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		250.000.000	262.800.000	158.880.000	124.950.000			241.920.000	79.440.000	121.100.000	-	-	92	50	97
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			7.000.000					6.950.000			-	-	99	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			5.000.000					4.900.000			-	-	98	-	-
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		11.471.100									-	-	-	-	-
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		5.000.000									-	-	-	-	-
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		5.000.000	5.000.000	1.375.000	3.780.000		-	4.450.000	1.300.000	3.780.000	-	-	89	95	100

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program	Pagu Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Pagu Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah				1.375.000					1.300.000		-	-	-	95	-
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		5.000.000,00	5.000.000		3.780.000			4.450.000		3.780.000	-	-	89	-	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		17.000.000	205.000.000	1.200.000	-	-	-	199.792.660	1.200.000	-	-	-	97	100	-
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			5.000.000					4.994.660			-	-	100	-	-
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		17.000.000,00									-	-	-	-	-
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1.200.000					1.200.000		-	-	-	100	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			200.000.000					194.798.000			-	-	97	-	-
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						-					-	-	-	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah		235.500.000	423.550.000	124.146.100	125.110.000			387.275.458	105.281.040	107.964.653	-	-	91	85	86
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		6.500.000	15.000.000	1.676.100	5.000.000			14.260.400	1.176.100	2.938.000	-	-	95	70	59
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		105.000.000	223.214.000	10.500.000	11.500.000			200.432.445	9.285.145	9.472.000	-	-	90	88	82
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			20.336.000	3.470.000				17.053.500	2.422.000		-	-	84	70	-

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program	Pagu Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Pagu Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		25.000.000	37.000.000	20.000.000	25.000.000			36.999.800	14.822.000	22.611.500	-	-	100	74	90
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		10.000.000	9.000.000	6.000.000	10.000.000	-		8.929.000	2.890.500	7.917.000	-	-	99	48	79
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		9.000.000	15.000.000	8.200.000	11.000.000	-		6.240.000	6.330.000	5.580.000	-	-	42	77	51
Penyediaan Bahan/Material		20.000.000	15.000.000	15.300.000	10.000.000			15.000.000	15.046.000	9.564.500	-	-	100	98	96
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		60.000.000	89.000.000	59.000.000	52.610.000			88.360.313	53.309.295	49.881.653	-	-	99	90	95
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD											-	-	-	-	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											-	-	-	-	-
Pengadaan Mebel											-	-	-	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											-	-	-	-	-
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						-					-	-	-	-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											-	-	-	-	-

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program	Pagu Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Pagu Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4.162.485.000	4.350.000.000	4.099.827.000	3.947.002.000	0	0	4.125.201.401	4.013.963.340	3.912.420.478	-	-	95	98	99
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3.000.000	6.000.000	7.950.000	6.700.000			5.169.000	7.431.000	5.937.000	-	-	86	93	89
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		110.000.000	107.000.000	98.780.000	115.260.000			83.154.903	90.455.340	90.067.853	-	-	78	92	78
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					3.825.042.000						-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		4.049.485.000	4.237.000.000	3.993.097.000				4.036.877.498	3.916.077.000	3.816.415.625	-	-	95	98	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		67.300.000	377.000.000	64.505.800	74.297.000	0	0	349.447.499	47.488.202	61.947.400	-	-	93	74	83
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		37.683.300	63.000.000					43.762.999			-	-	69	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				42.905.800	50.289.000				33.405.202	39.988.500	-	-	-	78	80
Pemeliharaan Mebel			5.000.000	500.000				4.925.000	500.000		-	-	99	100	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		12.000.000	10.000.000	6.100.000	12.500.000			9.042.000	2.860.000	10.600.000	-	-	90	47	85
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		17.616.700	299.000.000	15.000.000	11.508.000	-		291.717.500	10.723.000	11.358.900	-	-	98	71	99
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		11.108.763.000	8.464.600.000	5.373.533.100	3.579.708.300		-	7.566.748.839	4.294.141.287	3.209.669.888	-	-	89	80	90

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program	Pagu Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Pagu Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		8.615.000.000	5.105.175.000	4.225.000.000	2.475.000.000		-	4.274.844.000	3.217.906.000	2.405.000.000	-	-	84	76	97
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan			40.175.000					39.641.000			-	-	99	-	-
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		8.615.000.000	3.165.000.000	495.000.000	100.000.000			3.011.505.000	297.906.000	100.000.000	-	-	95	60	100
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap			1.900.000.000	3.730.000.000	2.375.000.000			1.223.698.000	2.920.000.000	2.305.000.000	-	-	64	78	97
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		1.208.763.000	2.174.825.000	681.678.500	187.065.300		0	2.164.870.600	648.375.000	163.978.000	-	-	100	95	88
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		133.763.000	197.599.500	644.512.000	142.581.000	0		195.430.600	616.337.000	130.648.500	-	-	99	96	92
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil			103.371.040			0		98.547.000			-	-	95	-	-
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		1.075.000.000	1.873.854.460	37.166.500	44.484.300			1.870.893.000	32.038.000	33.329.500	-	-	100	86	75
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		1.285.000.000	1.184.600.000	466.854.600	917.643.000		-	1.127.034.239	427.860.287	640.691.888	-	-	95	92	70
Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)						0					-	-	-	-	-
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		1.285.000.000	1.184.600.000	466.854.600	917.643.000	0		1.127.034.239	427860287	640.691.888	-	-	95	92	70

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program	Pagu Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Pagu Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		1.324.090.000	960.000.000	886.805.000	75.000.000		-	882.159.875	806.583.200	68.604.598	-	-	92	91	91
<i>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing											-	-	-	-	-
Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing											-	-	-	-	-
<i>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</i>		235.000.000	129.000.000	12.000.000	25.000.000	0	0	116.979.475	10.378.200	19.897.598	-	-	91	86	80
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil		210.000.000	50.000.000					47.294.275			-	-	95	-	-
Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan											-	-	-	-	-

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program	Pagu Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Pagu Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil															
Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha			50.000.000	12.000.000	25.000.000			46.063.000	10.378.200	19.897.598	-	-	92	86	80
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		25.000.000	29.000.000					23.622.200			-	-	81	-	-
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		1.089.090.000	831.000.000	874.805.000	50.000.000		-	765.180.400	796.205.000	48.707.000	-	-	92	91	97
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			15.000.000					10.853.200			-	-	72	-	-
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		38.090.000	363.000.000					322.066.800			-	-	89	-	-
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1.051.000.000	438.000.000	865.000.000	30.000.000			424.762.400	786.400.000	30.000.000	-	-	97	91	100
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				9.805.000	20.000.000				9.805.000	18.707.000	-	-	-	100	94
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat			15.000.000					7.498.000			-	-	50	-	-
Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat											-	-	-	-	-
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

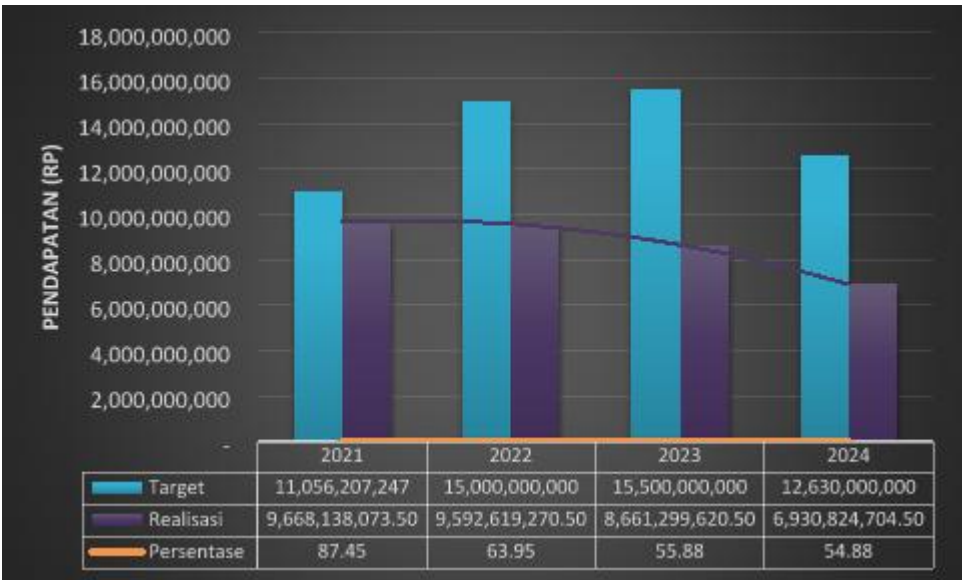
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program	Pagu Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Pagu Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota															
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota											-	-	-	-	-
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota											-	-	-	-	-
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		425.000.000	1.495.000.000	1.220.092.000	290.000.000		0	1.471.127.500	1.144.071.000	287.167.700	-	-	98	94	99
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		80.000.000	25.000.000	1.394.500	70.000.000		0	24.145.400	1.354.000	67.495.200	-	-	97	97	96
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		80.000.000	25.000.000	1.394.500	70.000.000			24.145.400	1.354.000	67.495.200	-	-	97	97	96
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		25.000.000	230.000.000	124.134.000	25.000.000		0	218.772.400	118.776.000	24.672.500	-	-	95	96	99
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		25.000.000	230.000.000	124.134.000	25.000.000			218.772.400	118.776.000	24.672.500	-	-	95	96	99
Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko											-	-	-	-	-

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program	Pagu Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Pagu Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		320.000.000	1.240.000.000	1.094.563.500	195.000.000		0	1.228.209.700	1.023.941.000	195.000.000	-	-	99	94	100
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		100.000.000	280.000.000	93.237.000				276.557.700	90.640.000		-	-	99	97	-
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		220.000.000	960.000.000	1.001.326.500	195.000.000			951.652.000	933.301.000	195.000.000	-	-	99	93	100

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 4 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang mulai diberlakukan pada tahun 2024, Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu OPD pengampu pendapatan dari sektor kelautan dan perikanan dalam hal ini retribusi penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan, retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, retribusi penyediaan fasilitas lainnya di TPI. Selama periode renstra 2021 – 2025 realisasi Pendapatan Asli Daerah sektor kelautan dan perikanan sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:

Grafik 2.1

Target dan Realisasi Pendapatan Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 – 2024



2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan.

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kelautan Dan Perikanan memiliki kelompok sasaran kinerja pelaku usaha kelautan dan perikanan yaitu:

1. Nelayan kecil
2. Pembudidaya ikan skala kecil
3. Pengolah dan Pemasar Produk Perikanan skala mikro kecil

2.1.5 Mitra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dalam Pemberian Layanan

Mitra perangkat daerah dalam pemberian layanan merupakan unsur penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan. Sinergi dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait diperlukan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian program dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Melalui kolaborasi antar perangkat daerah, diharapkan penyelenggaraan pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan terintegrasi sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir.

Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pemberian layanan bermitra dengan beberapa instansi antara lain:

1. KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang menjalin kolaborasi dengan KKP dalam pemberdayaan pelaku utama melalui program pembinaan, peningkatan kapasitas, serta akses terhadap bantuan dan teknologi perikanan.

2. Politeknik Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan bermitra dengan Politeknik Kelautan dan Perikanan dalam penyelenggaraan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) sektor kelautan dan perikanan. Kemitraan ini difokuskan pada pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, transfer pengetahuan dan teknologi, serta

pendampingan teknis bagi aparaturnya, pelaku usaha perikanan, dan masyarakat pesisir. Melalui kerja sama tersebut diharapkan terjadi peningkatan kompetensi, keterampilan, serta penerapan teknologi tepat guna yang mendukung peningkatan produktivitas, daya saing usaha perikanan, dan pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.

Selain pelayanan kepada pelaku utama kelautan dan perikanan, Politeknik Kelautan dan Perikanan juga berperan dalam memfasilitasi putra-putri pelaku utama sektor kelautan dan perikanan untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan vokasi. Melalui penyediaan akses pendidikan, program afirmasi, serta pembinaan dan peningkatan kompetensi, Politeknik Kelautan dan Perikanan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang profesional, berdaya saing, dan mampu mendukung pengembangan usaha serta keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan di daerah.

3. Balai Benih Ikan Janti

Kemitraan antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dengan Balai Benih Ikan Janti dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas produksi dan kualitas benih ikan bagi pelaku usaha perikanan budidaya. Kerja sama ini diarahkan pada penyediaan sumber benih unggul, transfer teknologi pembenihan dan pembudidayaan ikan, serta penguatan kompetensi sumber daya manusia melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan teknis. Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas usaha budidaya perikanan, memperkuat ketahanan sektor perikanan daerah, serta mendorong peningkatan kesejahteraan pembudidaya ikan di Kabupaten Rembang.

4. Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (BLPKIL)

Balai Layanan Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (BLPKIL) Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu mitra strategis Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mendukung peningkatan kualitas dan keberlanjutan usaha perikanan. Peran kemitraan ini

terutama dalam penyediaan layanan pengujian kesehatan ikan, diagnosa penyakit ikan, serta pengujian kualitas lingkungan perairan yang menjadi dasar dalam pengendalian penyakit dan peningkatan produktivitas usaha perikanan budidaya. Kemitraan ini sangat mendukung peningkatan produktivitas produksi perikanan karena Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang sampai saat ini belum memiliki Unit pengelola Kesehatan ikan dan lingkungan.

5. Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang bekerja sama dengan BBWS dalam pengelolaan dan pengaturan saluran tambak primer serta pembangunan dan pemeliharaan bangunan pantai guna mendukung keberlanjutan usaha perikanan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang kurang bijak dapat menimbulkan kerusakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan dan ketahanan pangan. Penentuan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan menjadi awal dalam merumuskan isu-isu strategis. Isu-isu strategis tersebut akan sangat membantu dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan 5 (lima) tahun ke depan. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, sasaran dan pendanaan indikatif pun akan lebih *reliable* berdasar pada identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Proses identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan, didasarkan pada kewenangan dan hasil evaluasi terhadap capaian/kondisi saat ini, standar yang digunakan, faktor faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi, sehingga akan muncul permasalahan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan selama 5 (lima) tahun ke belakang.

Potensi yang daerah yang menjadi kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan antara lain:

1. Pemberdayaan nelayan kecil
2. Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan sebagai pendukung ekonomi sektor kelautan dan perikanan
3. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Skala Kecil

Potensi tersebut diatas menjadi dasar penentuan permasalahan yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan selama 5 tahun ke depan.

Berikut ini merupakan permasalahan-permasalahan perangkat daerah dalam RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029 :

1. Keterbatasan kewenangan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan kelautan dan perikanan.
2. Menurunnya daya dukung sumber daya ikan akibat penangkapan berlebihan dan pemakaian alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.
3. Belum optimalnya pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.
4. Rendahnya Kapasitas sumber daya manusia nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar produk pengolahan perikanan.
5. Terbatasnya penguasaan dan penerapan teknologi budidaya ikan.
6. Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan dan jaminan keamanan pangan
7. Terbatasnya akses pasar dan permodalan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 juga memperhatikan beberapa permasalahan strategis sesuai dengan RPJMD 2025 – 2029 antara lain sebagai berikut :

1. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan yang dilakukan secara sistematis untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui integrasi perspektif gender dalam seluruh tahapan pembangunan, meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta program pembangunan. Dalam konteks penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan, pengarusutamaan gender

menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan guna memastikan bahwa pembangunan sektor kelautan dan perikanan memberikan manfaat yang adil dan setara bagi perempuan maupun laki-laki.

Sektor kelautan dan perikanan memiliki karakteristik kegiatan ekonomi yang melibatkan berbagai peran masyarakat pesisir. Dalam praktiknya, peran laki-laki umumnya lebih dominan pada kegiatan penangkapan ikan di laut, sementara perempuan banyak terlibat dalam kegiatan pascapanen, seperti pengolahan hasil perikanan, pemasaran produk, serta pengelolaan usaha rumah tangga berbasis perikanan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pengarusutamaan gender dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk mendorong integrasi perspektif gender dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, penguatan kapasitas pelaku usaha perikanan perempuan, pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat pesisir yang inklusif, serta penyediaan data dan informasi terpilah sebagai dasar perencanaan pembangunan yang lebih responsif gender.

Pelaku utama sektor kelautan dan perikanan yang tergabung dalam kelompok usaha Bersama, kelompok pembudidaya ikan dan kelompok pengolah dan pemasar memiliki komposisi anggota yang

2. Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem pada masyarakat pesisir, khususnya rumah tangga nelayan dan pelaku usaha perikanan skala kecil, masih menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Rembang.

Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi oleh karakteristik usaha perikanan yang memiliki tingkat ketidakpastian tinggi, terutama terkait faktor musim, kondisi cuaca, fluktuasi hasil tangkapan, serta dinamika harga ikan di pasar. Ketergantungan pada kegiatan penangkapan ikan yang bersifat musiman menyebabkan pendapatan rumah tangga nelayan tidak stabil, sehingga pada periode

tertentu sebagian nelayan berpotensi mengalami penurunan pendapatan yang signifikan. Kondisi ini lebih dirasakan oleh nelayan tradisional dengan keterbatasan modal, teknologi penangkapan, dan akses terhadap sarana produksi.

Selain faktor produksi, kemiskinan nelayan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti struktur tata niaga perikanan, keterbatasan akses terhadap lembaga pembiayaan formal, serta praktik hubungan ekonomi yang tidak seimbang antara nelayan dengan pemodal atau tengkulak. Dalam beberapa kasus di wilayah pesisir Rembang, pola ketergantungan terhadap sistem utang informal bahkan dapat memperkuat lingkaran kemiskinan pada masyarakat nelayan kecil.

Permasalahan lainnya adalah masih terbatasnya diversifikasi usaha ekonomi masyarakat pesisir, sehingga sebagian besar rumah tangga nelayan sangat bergantung pada satu sumber pendapatan utama, yaitu penangkapan ikan. Ketika terjadi penurunan produksi atau gangguan aktivitas melaut, maka kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar menjadi rentan. Di sisi lain, keterbatasan kualitas sumber daya manusia, rendahnya akses terhadap teknologi pengolahan hasil perikanan, serta belum optimalnya pengembangan rantai nilai perikanan turut mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir.

Oleh karena itu, penanganan kemiskinan ekstrem di sektor kelautan dan perikanan memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui peningkatan produktivitas usaha perikanan, penguatan kelembagaan ekonomi nelayan, pengembangan diversifikasi usaha perikanan dan kelautan, serta peningkatan akses terhadap pembiayaan, teknologi, dan pasar. Upaya tersebut perlu diintegrasikan dengan kebijakan pembangunan daerah serta sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

Penanggulangan kemiskinan sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu focus dalam renstra dinas kelautan dan perikanan, hal ini merupakan bagian dari upaya untuk menurunkan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Rembang yang ditargetkan turun

menjadi 10,02-9,51 persen pada akhir 2030. Untuk mencapai target tersebut ada beberapa upaya yang di ambil oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Penanggulangan Kemiskinan, antara lain :

1. Peningkatan produktivitas usaha perikanan tangkap dan budidaya
2. Penguatan akses permodalan bagi pelaku utama perikanan
3. Pengembangan nilai tambah produk perikanan
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku utama kelautan dan perikanan
5. Fasilitasi perlindungan sosial bagi pelaku utama kelautan dan perikanan

2.2.2 Isu Strategis

Isu Strategis merupakan permasalahan Perangkat Daerah, potensi atau tantangan yang akan dihadapi oleh perangkat daerah ke depan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan memperhatikan Lingkungan Dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang mempengaruhi perangkat daerah langsung maupun tidak langsung. Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 juga memperhatikan beberapa isu strategis seperti :

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan; telaah kewenangan; permasalahan OPD; isu KLHS; isu global, nasional dan regional maka berikut ini maka berikut ini adalah isu-isu strategis yang dapat ditindaklanjuti Dinas Kelautan dan Perikanan selama lima tahun, yaitu :

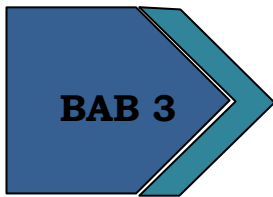
1. Pengarusutamaan Gender
2. Menurunnya pertumbuhan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya di Kabupaten Rembang
3. Rendahnya tingkat konsumsi ikan per kapita di Kabupaten Rembang

Proses menyimpulkan isu strategis Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	ISU KLHS yang Relevan dengan PD	ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			ISU Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Perikanan Tangkap						
- Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota	Keterbatasan kewenangan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan kelautan dan perikanan	Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan Daerah Belum Maksimal	Perdagangan internasional	Rendahnya Produktivitas	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Menurunnya pertumbuhan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya di Kabupaten Rembang
	Menurunnya daya dukung sumber daya ikan akibat penangkapan berlebihan dan pemakaian alat tangkap yang tidak ramah lingkungan	Ketahanan Pangan	Perubahan Iklim	Krisis Lingkungan	Ketahanan pangan yang berkelanjutan	
- Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Belum optimalnya pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.					
Perikanan Budidaya						

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	ISU KLHS yang Relevan dengan PD	ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			ISU Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
- Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	Rendahnya Kapasitas sumber daya manusia nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar produk pengolahan perikanan	Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan Daerah Belum Maksimal	Perdagangan internasional	Rendahnya Produktivitas	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	
- Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan	- Terbatasnya penguasaan dan penerapan teknologi budidaya ikan	Ketahanan Pangan	Perubahan Iklim	Krisis Lingkungan	Ketahanan pangan yang berkelanjutan	
- Pengelolaan pembudidayaan ikan	Terbatasnya pengelolaan kawasan dan lingkungan budidaya	Ketahanan Pangan	Perubahan Iklim	Krisis Lingkungan	Ketahanan pangan yang berkelanjutan	
Pengolahan dan Pemasaran						
	Masih terbatasnya akses jaringan permodalan dan pemasaran	Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan Daerah Belum Maksimal	Perdagangan internasional	Rendahnya Produktivitas	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Rendahnya tingkat konsumsi ikan per kapita di Kabupaten Rembang
	Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan dan jaminan keamanan pangan	Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan Daerah Belum Maksimal	Perdagangan internasional	Rendahnya Produktivitas	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	



TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029

Pemerintah Kabupaten Rembang memiliki visi yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang 2025 – 2029. Visi pembangunan jangka menengah tersebut yaitu “Mewujudkan Rembang Sejahtera”. Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Rembang 2025-2029 dirumuskan menjadi 5, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat, dan Berdaya Saing;
2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Inklusif, Berbasis Potensi Unggulan, serta Mampu Mengurangi Kemiskinan;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional;
4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Berkualitas dan Berkelanjutan;
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang mengemban tugas untuk mendukung misi kedua yaitu Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Inklusif, Berbasis Potensi Unggulan, serta Mampu Mengurangi Kemiskinan. Tujuan daerah untuk mewujudkan misi kedua tersebut adalah “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada penurunan kemiskinan”. Sasaran daerah yang akan dicapai adalah “Meningkatnya nilai investasi, penyerapan tenaga kerja, kontribusi sektor unggulan dalam perekonomian, dan ketahanan pangan” dengan indikator sasaran yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perkapita Kabupaten/Kota. Sasaran daerah ini dijadikan sebagai tujuan RENSTRA perangkat daerah.

Tujuan perangkat daerah merupakan kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 tahun untuk menggambarkan peranan PD dalam mendukung sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD. Untuk mewujudkan hal tersebut maka ditetapkan tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk periode 2025 -2030 yaitu **“Meningkatkan Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan”** dengan indikator Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

3.2. Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029

Penetapan sasaran merupakan rangkaian kinerja yang fokus pada prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan RENSTRA perangkat daerah. Penentuan target tahun 2025-2030 mengedepankan prinsip rasionalitas dengan mempertimbangkan hasil evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dengan baseline capaian tahun 2024. Dari penjelasan tersebut ditetapkan sasaran OPD yang hendak dicapai beserta indikator sasaran OPD untuk periode 2025 – 2030 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Produksi Perikanan dengan indikator Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya);
2. Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (AKI) dengan indikator Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Th);
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Akuntabilitas dan Pengendalian Kinerja Perangkat Daerah Dinlutkan dengan indikator Nilai SAKIP Dinlutkan, Nilai IKM Dinlutkan serta Nilai MRI Dinlutkan

Keterkaitan dari tujuan dan sasaran dan indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang untuk Urusan Kelautan dan Perikanan dalam 5 Tahun mendatang tercantum dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang
Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-						Ket
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya nilai investasi, penyerapan tenaga kerja, kontribusi sektor unggulan dalam perekonomian, dan ketahanan pangan	Meningkatkan Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan		Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	4,99	4,99	4,99	4,99	5	5	5	5
		Meningkatnya Produksi Perikanan	Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Ton	83.274	83.383	83.493	83.603	83.714	83.824	83.935	83.935
		Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Kg/Kapita/Th	46,3	48	50	52	54	56	58	58
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Akuntabilitas dan Pengendalian Kinerja Perangkat Daerah Dinlutkan	Nilai SAKIP Dinlutkan	Angka	50,85	51	51,5	52	52,5	53	53,5	53,5
			Nilai IKM Dinlutkan	Angka	78,5	78,5	79	79,5	80	80,5	81	81
			Nilai MRI Dinlutkan	Angka	2,617	2,625	2,705	2,785	2,868	2,953	3.040	3.040

3.3. Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029

Pemilihan strategi dan arah kebijakan dalam bab ini dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Strategi yang akan diambil dalam menjawab permasalahan-permasalahan pembangunan sektor kelautan dan perikanan adalah :

1. Peningkatan produksi tangkap dan produktivitas nelayan yang didukung teknologi informasi terpadu, penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, pengembangan sarana dan prasarana Tempat Pelelangan Ikan;
2. Peningkatan produksi budidaya ikan melalui penggunaan benih berkualitas dan induk unggul yang didukung penerapan teknologi, produksi pakan, lingkungan perairan yang kondusif, pembudidaya yang kompeten serta sarana prasarana yang memadai;
3. Peningkatan mutu produk dan jaminan keamanan pangan usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan tradisional serta mendorong usaha pengolahan dan pemasaran modern untuk berorientasi ekspor;
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah.

Pelaksanaan strategi perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam penerapannya dibagi dalam tahapan yang disesuaikan dengan RPJMD. Tahapan pelaksanaan strategi tahun 2026 – 2030 sebagaimana terdapat dalam tabel 3.2.

3.4. Arah Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan RENSTRA PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RENSTRA

PD. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan upaya atau cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RENSTRA yang telah ditetapkan. Arah kebijakan melaksanakan penetapan fokus, penetapan prioritas, pentahapan atau pemilihan penetapan kelompok sasaran dan juga menyesuaikan arah kebijakan dalam RPJMD.

Sebagai tindak lanjut dari strategi yang ada, ditetapkan arah kebijakan yang lebih bersifat operasional serta diharapkan mampu menyelesaikan akar permasalahan yang dihadapi masyarakat selama ini. Arah kebijakan yang akan diambil dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Pengelolaan perikanan tangkap dengan fokus :
 - a. Pengembangan Sarana dan Prasarana di Tempat Pelelangan Ikan;
 - b. Pemberdayaan usaha perikanan tangkap skala kecil;
 - c. Penguatan kelembagaan kelompok nelayan;
 - d. Pelatihan ketrampilan dan peningkatan kompetensi nelayan kecil;
 - e. Penggantian alat tangkap ramah lingkungan;
 - f. Peningkatan sarpras penangkapan ikan untuk nelayan kecil;
 - g. Mendorong penggunaan teknologi modern untuk penangkapan ikan;
 - h. Pemberian rekomendasi BBM bersubsidi untuk nelayan kecil
 - i. Penguatan akses permodalan dan kemitraan serta pemasaran disektor perikanan
2. Pengelolaan Perikanan Budidaya melalui:
 - a. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis pembudidayaan ikan sesuai dengan prinsip-prinsip Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPIB);
 - b. Penerapan teknologi budidaya yang toleran terhadap perubahan cuaca;

- c. Fasilitasi perizinan usaha perikanan budidaya (Gerei Perizinan)
 - d. Fasilitasi terkait dengan akses permodalan dan pembiayaan usaha perikanan budidaya;
 - e. Intensifikasi dan penerapan teknologi produksi perikanan budidaya yang adaptif;
 - f. Pengembangan pakan ikan mandiri;
 - g. Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
 - h. Pengembangan sentra/kawasan/kampung perikanan budidaya;
 - i. Peningkatan sarana dan prasarana produksi benih dan calon induk unggul;
 - j. Rehabilitasi sarana prasarana unit perbenihan UPTD;
 - k. Fasilitasi perizinan usaha perikanan budidaya ;
 - l. Fasilitasi terkait dengan akses permodalan dan pembiayaan usaha perikanan budidaya;
 - m. Peningkatan kapasitas pembudidaya ikan;
 - n. Fasilitasi monitoring kualitas lingkungan budidaya dan hama penyakit ikan;
3. Optimalisasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, melalui :
- a. Peningkatan kompetensi pengolah hasil perikanan;
 - b. Peningkatan sarana prasarana dan inovasi teknologi pengolah hasil perikanan;
 - c. Pendampingan Pengolahan Ikan untuk memenuhi persyaratan GMP/SSOP;
 - d. Diversifikasi produk perikanan;
 - e. Fasilitasi kemitraan pemasaran antara pelaku usaha;
 - f. Penguatan kerjasama tata kelola logistic;
 - g. Promosi dan pemasaran produk perikanan termasuk Gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan)

h. Peningkatan angka konsumsi ikan melalui peningkatan kompetensi dan penguatan jaringan distribusi, serta memastikan ketercukupan kebutuhan protein untuk pendukung pangan daerah

i. Masih adanya kesenjangan gender pada SDM usaha perikanan

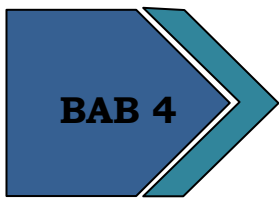
Arah kebijakan perangkat daerah yang ditetapkan harus relevan dengan arah kebijakan RPJMD daerah. Relevansi arah kebijakan terdapat dalam Tabel. 3.2.

Tabel 3. 2 Tahapan Rencana Strategis

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Peningkatan pemberdayaan pelaku usaha perikanan	Pengembangan pemberdayaan pelaku usaha perikanan	Penguatan dan pemerataan pemberdayaan pelaku usaha perikanan	Pemantapan pemberdayaan pelaku usaha perikanan	Perwujudan pemberdayaan pelaku usaha perikanan
Peningkatan produksi perikanan dengan fokus pada upaya untuk meningkatkan sarpras perikanan melalui revitalisasi TPI sebanyak 3 unit, mendorong penggunaan teknologi modern kepada pelaku usaha perikanan di Kecamatan Kaliori, Rembang, Lasem, Sluke, Kragan dan Sarang, serta penguatan pemasaran disektor perikanan kepada pelaku usaha perikanan di Kecamatan Kaliori, Rembang, Lasem, Sluke, Kragan dan Sarang	Pengembangan produksi perikanan dengan fokus pada upaya untuk meningkatkan sarpras perikanan melalui revitalisasi TPI sebanyak 3 unit, mendorong penggunaan teknologi modern kepada pelaku usaha perikanan di Kecamatan Kaliori, Rembang, Lasem, Sluke, Kragan dan Sarang, serta penguatan pemasaran disektor perikanan kepada pelaku usaha perikanan di Kecamatan Kaliori, Rembang, Lasem, Sluke, Kragan dan Sarang	Penguatan produksi perikanan dengan fokus pada upaya untuk meningkatkan sarpras perikanan melalui revitalisasi TPI sebanyak 3 unit, mendorong penggunaan teknologi modern kepada pelaku usaha perikanan di Kecamatan Kaliori, Rembang, Lasem, Sluke, Kragan dan Sarang, serta penguatan pemasaran disektor perikanan kepada pelaku usaha perikanan di Kecamatan Kaliori, Rembang, Lasem, Sluke, Kragan dan Sarang	Pemantapan produksi perikanan dengan fokus pada upaya untuk meningkatkan sarpras perikanan melalui revitalisasi TPI sebanyak 3 unit, mendorong penggunaan teknologi modern kepada pelaku usaha perikanan di Kecamatan Kaliori, Rembang, Lasem, Sluke, Kragan dan Sarang, serta penguatan pemasaran disektor perikanan kepada pelaku usaha perikanan di Kecamatan Kaliori, Rembang, Lasem, Sluke, Kragan dan Sarang	Perwujudan produksi perikanan dengan fokus pada upaya untuk meningkatkan sarpras perikanan melalui revitalisasi TPI sebanyak 3 unit, mendorong penggunaan teknologi modern kepada pelaku usaha perikanan di Kecamatan Kaliori, Rembang, Lasem, Sluke, Kragan dan Sarang, serta penguatan pemasaran disektor perikanan kepada pelaku usaha perikanan di Kecamatan Kaliori, Rembang, Lasem, Sluke, Kragan dan Sarang
Peningkatan angka konsumsi ikan melalui kampanye dan intervensi gerakan makan ikan di anak sekolah sasaran MBG melalui Progam MBG, memasukkan menu ikan di PMT Posyandu, pendampingan penerbitan SKP UPI di Kecamatan Kaliori, Rembang, Lase, ,Kragan Sarang, Sluke	Pengembangan angka konsumsi ikan melalui kampanye dan intervensi gerakan makan ikan di anak sekolah sasaran MBG melalui Progam MBG, memasukkan menu ikan di PMT Posyandu, pendampingan penerbitan SKP UPI di Kecamatan Kaliori, Rembang, Lase, ,Kragan Sarang, Sluke	Penguatan angka konsumsi ikan melalui kampanye dan intervensi gerakan makan ikan di anak sekolah sasaran MBG melalui Progam MBG, memasukkan menu ikan di PMT Posyandu, pendampingan penerbitan SKP UPI di Kecamatan Kaliori, Rembang, Lase, ,Kragan Sarang, Sluke	Pemantapan angka konsumsi ikan melalui kampanye dan intervensi gerakan makan ikan di anak sekolah sasaran MBG melalui Progam MBG, memasukkan menu ikan di PMT Posyandu, pendampingan penerbitan SKP UPI di Kecamatan Kaliori, Rembang, Lase, ,Kragan Sarang, Sluke	Perwujudan angka konsumsi ikan sesuai dengan target nasional melalui kampanye dan intervensi gerakan makan ikan di anak sekolah sasaran MBG melalui Progam MBG, memasukkan menu ikan di PMT Posyandu, pendampingan penerbitan SKP UPI di Kecamatan Kaliori, Rembang, Lase, ,Kragan Sarang, Sluke

Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan kualitas hidup pelaku usaha perikanan melalui modernisasi dan peningkatan produktivitas perikanan dan pengolahan, penguatan infrastruktur dan akses pasar, peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan, pembudidaya serta pengolah dan pemasar, serta diversifikasi dan hilirisasi produk perikanan	Peningkatan produksi perikanan dengan fokus pada upaya untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur perikanan, mendorong penggunaan teknologi modern, serta penguatan hilirisasi industri disektor perikanan	1. Peningkatan produksi tangkap dan produktivitas nelayan yang didukung teknologi informasi terpadu, penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, pengembangan sarana dan prasarana Tempat Pelelangan Ikan; 2. Peningkatan produksi budidaya ikan melalui penggunaan benih berkualitas dan induk unggul yang didukung penerapan teknologi, produksi pakan, lingkungan perairan yang kondusif, pembudidaya yang kompeten serta sarana prasarana yang memadai; 3. Peningkatan mutu produk dan jaminan keamanan pangan usaha pengolahan dan pemasaran produk perikanan tradisional serta mendorong usaha pengolahan dan pemasaran modern untuk berorientasi ekspor; 4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah.	Pendukung pencapaian Produksi Perikanan
2.	Meningkatkan angka konsumsi ikan daerah melalui pemberdayaan perikanan, serta penguatan jaringan distribusi	Peningkatan angka konsumsi ikan melalui penyedia sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi dan penguatan jaringan distribusi, serta memastikan kecukupan kebutuhan protein dari ikan untuk penunjang pangan daerah	Peningkatan angka konsumsi ikan melalui peningkatan kompetensi dan penguatan jaringan distribusi, serta memastikan kecukupan kebutuhan protein untuk pendukung pangan daerah	Pendukung pencapaian AKI



PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif Urusan

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang 2025–2029 yang diambil dari program yang menunjang secara langsung pencapaian Tujuan dan Sasaran serta program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan pada satu urusan pilihan (kelautan dan perikanan), rencana programnya adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Ketiga program diatas dijabarkan dalam beberapa kegiatan. Kegiatan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Hasil perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel 4.1

Setelah memilih program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk lima tahun kedepan, tahapan selanjutnya adalah penentuan target dan pagu anggaran. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan

beserta target dan pagu anggarannya tahun 2026-2030 tercantum dalam tabel 4.2 .

Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja. Perumusan program prioritas juga perlu memperhatikan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2025-2029. Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan satu program unggulan yaitu “Pemberdayaan petani dan nelayan”. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati maka perlu disesuaikan dengan program nomenklatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024. Program tersebut tercantum pada Tabel 4.3

Tabel 4.1

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya realisasi investasi alam mendukung peningkatan produktivitas daerah	Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan				PDRB Sub Sektor Perikanan		
		Meningkatnya Produksi Perikanan			Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)		
		Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan			Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita/th)		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang didukung dengan inovasi dan penerapan e-government publik yang profesional, berintegritas tinggi dan responsif berbasis digital.					Indeks RB		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya Kualtas Pelayanan, Akuntabilitas dan Pengendalian Kinerja Perangkat Daerah Dinlutkan			1. Nilai SAKIP Dinlutkan		
					2. Nilai IKM Dinlutkan		
					3. Nilai MRI Dinlutkan		
			MENINGKATNYA PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS USAHA PERIKANAN TANGKAP SECARA BERKELANJUTAN		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
				Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung usaha perikanan tangkap di perairan umum darat	Jumlah sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap yang tersedia	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	
				Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	
				Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap Terjamin dan Tersedia	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
				Meningkatnya kapasitas dan kemandirian nelayan kecil	Jumlah nelayan kecil yang terfasilitasi pemberdayaan	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
				Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha kepada Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	
				Pengelolaan dan operasional TPI	Jumlah TPI yang dikelola dan difasilitasi operasionalnya	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
				Ditetapkannya SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
				Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
			MENINGKATNYA PRODUKSI		JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
			PERIKANAN BUDIDAYA				
				Dokumen Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang diterbitkan	Jumlah izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang diterbitkan	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	
				Terlayannya Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing Melalui Penerbitan Rekomendasi Teknis	(Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	(Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	
				Diterbitkannya Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota	Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan kewenangan Kabupaten/Kota yang Diterbitkannya	Penerbitan Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya kapasitas pembudi daya ikan kecil	Jumlah pembudidaya ikan/pelaku usaha perikanan yang diberdayakan	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	
				Terlaksananya Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
				Terlaksananya Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha kepada Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	
				Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya produksi dan produktivitas usaha pembudidayaan ikan yang berkelanjutan	Jumlah Pembudidaya ikan Yang Terfasilitasi sarana dan prasarana perikanan budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
				Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terkelolanya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	
				Terlaksananya Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat bagi Pembudidaya Ikan	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	
				Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Jumah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	
				Penyediaan Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan	Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia	Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	
		Meningkatnya konsumsi ikan			ANGKA KONSUMSI IKAN (kg/Kap/Th)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
			MENINGKATNYA KONSUMSI IKAN OLEH MASYARAKAT		ANGKA KONSUMSI IKAN (kg/Kap/Th)	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
				Meningkatnya jumlah Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil yang terdaftar	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan risiko	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	
					Jumlah Rekomendasi Perizinan Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		
				Terlaksananya penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Perizinan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitka	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan Kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
				Terlaksananya verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar Usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	
				Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	
				Meningkatnya Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil yang mendapatkan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	
				Tersedianya dan Tersalurkannya Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
				Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang didukung dengan inovasi dan penerapan e-government publik yang profesional, berintegritas tinggi dan responsif berbasis digital.					Indeks RB		
		Meningkatnya Kualtas Pelayanan, Akuntabilitas dan Pengendalian Kinerja Perangkat Daerah Dinlutkan			1. Nilai SAKIP Dinlutkan		
					2. Nilai IKM Dinlutkan		
					3. Nilai MRI Dinlutkan		
			Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui penyelenggaraan layanan penunjang yang efektif, efisien, dan tepat waktu		Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersusunnya dokumen perencanaan laporan capaian indikator kinerja perangkat daerah	Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Dokumen Laporan Keuangan yang akuntabel	Dokumen Laporan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Dokumen Laporan BMD yang Akuntabel	Dokumen Laporan BMD	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Laporan pendapatan perangkat daerah yang memenuhi standar akuntabilitas	Persentase laporan pendapatan yang disampaikan sesuai standar akuntabilitas	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	
				Dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan sesuai standar waktu	Jumlah dokumen kepegawaian yang diproses sesuai standar waktu pelayanan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya pelayanan umum sesuai standar pelayanan minimal (SPM)	Persentase pelayanan umum yang terpenuhi sesuai standar pelayanan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memenuhi standar	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terpenuhinya kebutuhan penunjang operasional perkantoran	persentase ketersediaan jasa penunjang opsional perkantoran	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan BMD	jumlah BMD yang terpelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8
						Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				-		-		-		-					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				16.750.000.000		19.200.000.000		17.153.000.000		19.387.000.000		20.655.000.000			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Layanan Penunjang Perangkat Daerah	NA	80	11.900.000.000	81	13.200.000.000	82	12.033.000.000	83	14.157.000.000	85	15.365.000.000	85	15.365.000.000	
KABUPATEN/KOTA															
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah		70	115.000.000	70,5	225.000.000	71	205.000.000	71,5	225.000.000	72	225.000.000	72	225.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2	1	10.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	2	1	10.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	10.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	5	10.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2	4	20.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	30.000.000	1	50.000.000	1	30.000.000	1	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaporan keuangan yang disampaikan tepat waktu		90	10.559.000.000	90	11.009.000.000	90	10.559.500.000	90	12.291.000.000	90	12.901.500.000	90,0	12.901.500.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36	180	10.384.000.000	180	10.839.000.000	180	10.299.500.000	180	12.131.000.000	180	12.741.500.000	180	12.741.500.000	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1	15.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	12	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen laporan Penatausahaan BMD yang disampaikan tepat waktu		80	60.000.000	82,5	60.000.000	85	60.000.000	87,5	60.000.000	90	60.000.000	90	60.000.000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian laporan pendapatan perangkat daerah yang akuntabel		80	50.000.000	82,5	50.000.000	85	40.000.000	87,5	40.000.000	90	40.000.000	90	40.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	0	1	25.000.000	1	25.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	0	3	25.000.000	3	25.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu		80	150.000.000	82,5	340.000.000	85	210.000.000	87,5	320.000.000	90	320.000.000	90	320.000.000	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0			2	30.000.000		0		0		0		0	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	180	25.000.000	180	100.000.000	180	50.000.000	180	100.000.000	180	100.000.000	180	100.000.000	
Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	0	180	25.000.000	180	100.000.000	180	50.000.000	180	100.000.000	180	100.000.000	180	100.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan umum		80	371.000.000	82,5	376.000.000	85	378.500.000	87,5	401.000.000	90	408.500.000	90	408.500.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	1	36.000.000	1	36.000.000	1	36.000.000	1	36.000.000	1	36.000.000	1	36.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	1	50.000.000	1	55.000.000	1	57.500.000	1	60.000.000	1	62.500.000	1	62.500.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		15.000.000		15.000.000	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	135.000.000	12	135.000.000	12	135.000.000	12	155.000.000	12	165.000.000	12	165.000.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1		1		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur		80	100.000.000	82,5	620.000.000	85,0	135.000.000	87,5	245.000.000	90,0	670.000.000	90,0	670.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	-	1	50.000.000			4	185.000.000		500.000.000		500.000.000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	10	50.000.000			15	75.000.000			25	100.000.000	25	100.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	5	50.000.000	6	70.000.000	5	60.000.000	5	60.000.000	5	70.000.000	5	70.000.000	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3			1	500.000.000		0		0		0		0	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Jasa Penunjang Perkantoran		80	150.000.000	82,5	215.000.000	85,0	235.000.000	87,5	255.000.000	90,0	265.000.000	90,0	265.000.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	135.000.000	12	150.000.000	12	170.000.000	12	190.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12			12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dengan kondisi Baik		80	345.000.000	82,5	305.000.000	85,0	210.000.000	87,5	320.000.000	90,0	475.000.000	90,0	475.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	73	73	85.000.000	73	90.000.000	73	90.000.000	73	95.000.000	73	100.000.000	73	100.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Operasional atau Lapangan	Pajak dan Perizinannya														
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20	20	15.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	25.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	20	20.000.000	20	20.000.000	20	25.000.000	20	25.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	5	200.000.000	4	150.000.000	4	50.000.000	5	150.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	20	25.000.000	20	25.000.000	20	25.000.000	20	25.000.000	20	25.000.000	20	25.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	76.690	76.920	2.850.000.000	77.074	3.900.000.000	77.228	3.100.000.000	77.383	3.200.000.000	77.615	3.250.000.000	77.615	3.250.000.000	
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana dan prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang tersedia	41	7	980.000.000	7	1.380.000.000	7	1.080.000.000	7	960.000.000	7	1.130.000.000	7	1.130.000.000	
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia		3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	2	2	750.000.000	2	1.000.000.000	2	850.000.000	2	730.000.000	2	900.000.000	2	900.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	39	5	200.000.000	5	350.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nelayan Kecil Yang diberdayakan	150	135	670.000.000	135	1.220.000.000	135	820.000.000	135	890.000.000	135	570.000.000	135	570.000.000	
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	70	50	150.000.000	50	300.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	50	120.000.000	50	120.000.000	
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	39	30	50.000.000	30	60.000.000	30	65.000.000	30	70.000.000	30	75.000.000	30	75.000.000	
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	39	30	50.000.000	30	60.000.000	30	65.000.000	30	70.000.000	30	75.000.000	30	75.000.000	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	41	25	420.000.000	25	800.000.000	25	540.000.000	25	600.000.000	25	300.000.000	25	300.000.000	
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase ketercapaian pelayanan TPI	71,43	71,43	1.200.000.000	71,43	1.300.000.000	71,43	1.200.000.000	71,43	1.350.000.000	71,43	1.550.000.000	71,43	1.550.000.000	
Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	5	5	1.100.000.000	5	1.200.000.000	5	1.100.000.000	5	1.250.000.000	5	1.450.000.000	5	1.450.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi perikanan budidaya	6.584	6.590	1.000.000.000	6.656	1.050.000.000	6.790	1.010.000.000	6.858	1.015.000.000	6.871,93	1.020.000.000	0,5	1.020.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	10	10	40.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	
Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota yang diterbitkan	10	10	20.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	
Penerbitan Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan kewenangan Kabupaten/ Kota yang Diterbitkannya	10	10	20.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya ikan/ pelaku usaha perikanan yang diberdayakan	14	20	160.000.000	22	335.000.000	27	310.000.000	32	320.000.000	40	320.000.000	40	320.000.000	
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	2	2	60.000.000	2	150.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	5	125.000.000	5	125.000.000	
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	3	5	25.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	2	3	25.000.000	5	60.000.000	6	70.000.000	8	80.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	
Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	7	10	50.000.000	10	75.000.000	12	90.000.000	15	90.000.000	20	45.000.000	20	45.000.000	
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pembudidaya Ikan yg Terfasilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	13	8	800.000.000	10	665.000.000	10	650.000.000	10	645.000.000	10	650.000.000	10	650.000.000	
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3	5	200.000.000	5	175.000.000	5	150.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	5	200.000.000	
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	5	3	25.000.000	3	50.000.000	4	60.000.000	4	65.000.000	5	70.000.000	5	70.000.000	
Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5	3	25.000.000	3	50.000.000	4	60.000.000	4	65.000.000	5	70.000.000	5	70.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10	3	50.000.000	5	75.000.000	5	90.000.000	5	180.000.000	5	190.000.000	5	190.000.000	
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	20	25	50.000.000	27	55.000.000	30	60.000.000	32	70.000.000	35	75.000.000	35	75.000.000	
Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	0	1	100.000.000	1	25.000.000	0	-	0	-	0	0	0	0	
Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	0	1	125.000.000	0		0		0		0	0	0	0	
Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia	0	10	200.000.000	10	210.000.000	10	205.000.000	5	40.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan	99.273	100,27	1.000.000.000	100,77	1.050.000.000	101,27	1.010.000.000	101,78	1.015.000.000	102,29	1.020.000.000	102,29	1.020.000.000	
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan risiko	3	3	165.000.000	3	190.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	190.000.000	3	190.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Jumlah Rekomendasi Perizinan Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	18	20		20		20		20		20		20		
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan Kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitkan	1	3	20.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	
Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	9	10	25.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000	
Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	9	10	25.000.000	10	35.000.000	10	35.000.000	10	35.000.000	10	35.000.000	10	35.000.000	
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	3	3	95.000.000	3	100.000.000	3	110.000.000	3	110.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil yang mendapatkan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	30	32	385.000.000	34	410.000.000	36	360.000.000	38	365.000.000	40	380.000.000	40	380.000.000	
Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	30	32	385.000.000	34	410.000.000	36	360.000.000	38	365.000.000	40	380.000.000	40	380.000.000	
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	30	32	450.000.000	34	450.000.000	36	450.000.000	38	450.000.000	40	450.000.000	40	450.000.000	
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	99272.5	99.471	250.000.000	99.670	250.000.000	99.670	250.000.000	99.670	250.000.000	99.870	250.000.000	99.870	250.000.000	
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	30	32	200.000.000	34	200.000.000	36	200.000.000	38	200.000.000	40	200.000.000	40	200.000.000	

Tabel 4.3

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Ket.
1	2	3	4	5
	KELAUTAN DAN PERIKANAN			
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap		
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
			Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	
			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	
			Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	
			Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	
			Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
			Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
			Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Ket.
1	2	3	4	5
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya		
			Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang pengusahaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Penerbitan Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
			Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	
			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
			Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	
			Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
			Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Ket.
1	2	3	4	5
			Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	
			Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	
			Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	
3	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat Konsumsi Ikan Penduduk		
			Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	
			Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan Kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri	
			Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
			Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	
			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	
			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	
			Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	
			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
			Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	Ket.
1	2	3	4	5
			Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	
			Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	
			Pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	
			Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	
			Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	
			Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan	
			Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	
			Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil	
			Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil	
			Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	
			Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada akhir tahun perencanaan. Berikut ini indikator kinerja utama Dinas Kelautan dan Perikanan :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama PD (IKU)

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Ahir Periode Renstra	Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	4,99	4,99	4,99	5	5	5	5	
2	Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Ton	83.273,64	83.383,25	83.493,1	83.603,19	83.713,53	83.824,1	83.824,1	
3	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Kg/Kapita/Th	48	50	52	54	56	58	58	
4	Nilai SAKIP Dinlutkan	Angka	51	51,5	52	52,5	53	53,5	53,5	
5	Nilai IKM Dinlutkan	Angka	78,5	79	79,5	80	80,5	81	81	
6	Nilai MRI Dinlutkan	Angka	2,625	2,705	2,785	2,868	2,953	3040	3040	

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Kunci PD (IKK)

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Ahir Periode Renstra	Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) (sumber data: one data KKP)	%	96,23	96,68	96,93	97,28	97,63	97,98	97,98	



PENUTUP

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan kelautan dan perikanan yang diampu oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang untuk periode 5 tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan kelautan dan perikanan dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi daerah Kabupaten Rembang yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.

Sasaran program dan kegiatan pembangunan dalam Rencana Strategis ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Rembang dan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang. Karena itu Renstra ini harus menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Rembang.

5.2 Pengendalian dan Evaluasi

Program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang merupakan pedoman untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan kelautan dan perikanan dan atau target kinerja sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Rembang. Pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Strategis Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Rembang yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Perikanan Kabupaten Rembang harus ditingkatkan. Hasil dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun laporan kinerja (LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Rembang.

Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (prove). Dalam rangka implementasi RENSTRA tahun 2025 – 2029 kaidah-kaidah pelaksanaan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan pedoman bagi seluruh pegawai di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dan pemangku kepentingan dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan;
- b. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan wajib berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025 – 2029;
- c. Dalam rangka menjaga efektivitas kinerja pelaksanaan RENSTRA tahun 2025 - 2029, wajib dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RENSTRA, dan mengkoordinasikan hasil evaluasi RENJA;
- d. RENSTRA Tahun 2025-2029 memungkinkan untuk diubah dengan ketentuan :
 - 1) Berdasarkan hasil pengendalian, monitoring, dan evaluasi menunjukkan kondisi tidak sesuai dengan kondisi yang berkembang pada saat monitoring dan evaluasi dilaksanakan;
 - 2) Hasil pengendalian, monitoring, dan evaluasi menunjukkan substansi yang dirumuskan tidak lagi sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat dilaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - 3) Terjadi perubahan mendasar (bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan/atau terjadi perubahan kebijakan nasional).
- e. Perubahan RENSTRA Tahun 2025-2029 tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun;
- f. RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Rembang setiap tahun mulai dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2029, kemudian digunakan juga sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setiap tahun mulai dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2029.

5.3 Pedoman Transisi

Sebagai pedoman transisi, pada saat RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2030–2034 belum tersusun, untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan RKPD setelah RENSTRA berakhir, maka RENSTRA ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RKA Tahun 2030.